PERANAN PEMERINTAH TERHADAP UMKM KOPI ARANIO

Nurlaila Hartini[1], Monry Fraick Nicky Gillian Ratumbuysang[2], Supriyanto[3], Mahmudah Hasanah[4]
1810113220009@mhs.ulm.ac.id[1], monryratumbuysang@gmail.com[2], supriyanto@ulm.ac.id[3], hasanah.mahmudah@gmail.com[4]
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terhadap UMKM Kopi Aranio kabupaten Banjar. Untuk mengetahui adanya peranan pemerintah baik dari segi fasilitator,regulator, katalisator. Sampel penelitian ini terdiri dari 2 lembaga instansi pemerintahan terdiri dari dinas kooperasi dan perdagangan Kabupaten Banjar, dinas pertanian kabupaten Banjar dan bisnis UMKM Kopi Aranio. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa adanya peranan pemerintah terhadap UMKM Kopi Aranio kabupaten Banjar baik secara fasilitator, regulator, dan katalisator untuk kemajuan sumber daya alam maupun manusia dalam memajukan UMKM Kopi Aranio. Diharapkan dengan adanya program pemerintah ini dapat memajukan kesehateraan umkm dalam daerah. Dengan adanya program pemerintah juga dapat mengapresiasi umkm kopi Aranio agar berjalan dengan baik serta tujuan dari memajukan umkm tersebut dapat tercapai.
Kata Kunci: Peranan Pemerintah Terhadap UMKM Kopi Aranio Kabupaten Banjar.

ABSTRACT

This research aims to analyze the government's role in Aranio Coffee MSMEs in Banjar district. To find out the role of government in terms of facilitator, regulator and catalyst. The sample for this research consisted of 2 government agencies consisting of the Banjar Regency cooperative and trade service, the Banjar Regency agriculture service and the Aranio Coffee MSME business. This research uses a qualitative approach, data collection techniques in this research use observation and interviews. The data analysis technique uses data triangulation. Based on the research results, it can be concluded that there is a government role in the Aranio Coffee MSMEs in Banjar district, both as a facilitator, regulator and catalyst for the advancement of natural and human resources in advancing the Aranio Coffee MSMEs. It is hoped that this government program can advance the health of MSMEs in the region. With this program, the government can also appreciate Aranio coffee SMEs so that they run well and the goal of advancing these SMEs can be achieved.
Keywords: *The Government's Role In Aranio Coffee MSMEs, Banjar Regency.*

PENDAHULUAN

Peran atau keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam pendistribusian pendapatan masyarakat. UMKM sangat berpengaruh dalam membantu pertumbuhan ekonomi, selain berperan dalam pertumbuhan perekonomian, UMKM juga sangat berperan dalam mengatasi pengangguran (Permana, 2017). Perekonomian yang berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang dalam istilah sering disebutkan UMKM ataupun usaha kecil, maka pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk pembinaaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional (Tri & Darwanto, 2013). Salah satu faktor penting dalam perkembangan dan penopang perekonomian di Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Pamungkas & Hidayatulloh, 2019). Usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu sektor yang memiliki peranan penting terhadap sebagian besar penduduk yang masih

berpendidikan dibawah standar dan hidup dalam usaha kecil sektor tradisional maupun modern. Namun, di sisi lain masih banyak UMKM memiliki permasalahan yang menghambat kelangsungan usahanya. Oleh sebab itu

Selama ini UMKM masih mengalami permasalah yang belum sepenuhnya terpecahkan, sehingga dari berbagai permasalahan tersebut menjadi penghalang bagi pengembangan dan kemajuan UMKM. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peningkatan iklim usaha UMKM telah didukung oleh pemerintah berupa pembuatan kebijakan mengenai UMKM yaitu UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di Indonesia peran UMKM dapat memberikan dampak positif yaitu dapat mengurangi pengangguran, memberantas banyak kemiskinan, meningkatkan ekonomi nasional maupun daerah. Namun di sisi lain pada kenyataannya UMKM masih banyak mengalami kendala. seperti kurangnya permodalan, kurangnya teknik produksi, lemahnya dalam mengelola manajemen pasar, serta rendahnya ilmu mengenai penguasaan teknologi untuk membantu proses produksi suatu usaha (Nirmala dkk., 2022). Salah satu peran penting UMKM dalam perekonomian adalah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor UMKM. Besarnya peran UMKM dalam industri pengolahan kopi membuat pemerintah melakukan perubahan demi kemajuan dari perkembangan UMKM dengan menerapkan berbagai kebijakan. Pendekatan tersebut yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan pada pertimbangan yang membuat pertumbuhan ekonomi bangkit dan maju. Kebijakan terkait pertumbuhan UMKM dibidang pengolahan kopi menjadi perhatian pemerintah dan tanggung ajwab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah adalah penggerak UMKM dan sebagai jembatan dalam membina masyarakat untuk tetap melakukan perubahan-perubahan untuk mengangkat UMKM. Usaha besar lebih mendahulukan peningkatan asetnya dibandingkan dengan memberikan sebagian kecil usahanya untuk digerap oleh pengusaha kecil dan menengah (Elli dkk., 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan UMKM kopi beserta observasi di Aranio Banjarmasin diperoleh informasi bahwa adanya pengaruh positif terhadap peranan pemerintah terhadap UMKM Kopi Aranio,Baik terhadap sektor, fasilitator, katasilsator, dan regulator, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dari Bank Indonesia (2015) terdapat sekitar 64,2 juta unit usaha di Indonesia, dimana sebanyak 99% merupakan UMKM. Namun, meskipun memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya permodalan.

Menurut data dari Bank Indonesia (2015), akses ke pembiayaan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, di mana sekitar 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan perbankan. Sehingga menyebabkan berkurangnya kemampuan dalam melakukan produksi dan keterbatasan alat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, permasalahan kurangnya teknik produksi yaitu sekitar 11% ditemukan kurang menariknya kemasan produk yang digunakan. Masalah lain yang dihadapi oleh UMKM adalah lemahnya manajemen pasar, yaitu sebesar 34% dimana sebagian besar hanya melakukan pemasaran produknya dalam lingkup regional (satu kota/kabupaten/provinsi). Selain itu, UMKM di Indonesia juga dihadapkan pada masalah kurangnya penguasaan teknologi. Menurut survei dari Kementerian Koperasi dan UMKM, (2017) hanya sekitar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yaitu 59,2 juta menggunakan teknologi platform online dalam memasarkan produknya. Penanggulangan

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, Upaya dalam memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan mampu menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan diprediksi akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Nalini, 2021). Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadirkan wirausahan-wirausahan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja (Karimah dkk., 2021).

Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat berpengaruh dalam pemberdayaan UMKM di Kota. Dari (Kementerian Keuangan RI, 2021) UMKM berpotensi tinggi akan perekonomian, membuat Pemerintah ikut andil dalam hal pemberdayaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah, Pemerintah daerah harusnya memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah (Christofer, 2019).

Kegiatan UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha, sehingga keberadaan UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningktan pedapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM di kabupaten Banjar (Nurzanah,dkk, 2020)

Menurut (Pamungkas & Hidayatulloh, 2019) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bisnis yang dimiliki oleh perseorangan. UMKM merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil dan memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktivanya. (Permana, 2017).UMKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu Negara yaitu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, UMKM juga mampu menjaga keberagaman budaya dan keragaman produk, serta mempromosikan kemandirian ekonomi di tingkat lokal. (Permana, 2017). Terdapat beberapa indikator atau kriteria yang lazim digunakan untuk mendefinisikan UMKM, antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan besarnya jumlah pekerja. Menurut (Halim, 2020) secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan bahan baku utama berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, bakat, dan karya seni tradisional daerah setempat. UMKM memegang peranan penting sebagai sektor yang potensial dan pnjaga stabilitas perekonomian Secara umum,mengingat usaha kecil dan menengah mempunyai keterlbatan yang sangat tinggi terhadap angkatan keja dan peningkatan kesehjahteraan rakyat. UMKM dikenal sebagai akronim dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Salman Al Farisi, 2022).

Menurut (Darwanto 2008:22) beberapa alasan kuat mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, usaha kecil menyerap

banyak tenaga kerja, adanya perkembangan usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja dan pengurangan jumlah kemiskinan. Kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan.Lokasi Usaha Kecil Menengah banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal.Ketiga, pemerataan dalam distribusi pendapatan.Gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa "Istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah, pemerintah adalah lembaga atau badan - badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut menjelaskan pemerintahan adalah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas –tugas dan fungsi –fungsi dari pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan suatu yang statis. (Niode, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis peneliti kualitatif yang akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan grant tour question, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek, Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah sukarnya merumuskan hipotesis. Selain itu, karena kedalaman dan keintensifan penyelidikan suatu masalah, penelitian kualitatif mempunyai sampel yang sedikit, menghabiskan waktu yangrelatif lama (karena lebih memperhatikan proses daripada hasil), dan tidak adanya tes signifikansi (Herdyansah, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa lokasi, deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan diuraikan sebagai berikut:

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Aranio, desa tiwingan baru. Dikutip dari laman BAPPELITBANG (2015) gambaran Wilayah Penelitian Kecamatan Aranio dilihat secara geografis terletak antara 3017 LS dan 11505 BT. Disebelah utara Kecamatan Aranio berbatasan dengan Kecamatan Pengaron, sebelah Timur dengan Kabupaten Tanah Bumbu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Karang Intan. Luas wilayah Kecamatan Aranio mencapai 1.166,35 Km2 atau sekitar 24, 98% dari luas wilayah Kabupaten Banjar. Kecamatan Aranio terbagi atas 12 desa, dengan desa terluas berada pada desa Rantau Bujur dengan luas wilayah 313,52 Km2 , sedangkan desa dengan luas wilayah paling kecil yaitu 20,07 Km2 ada di Desa Aranio.

Gambar 1 sumber BAPPELITBANG

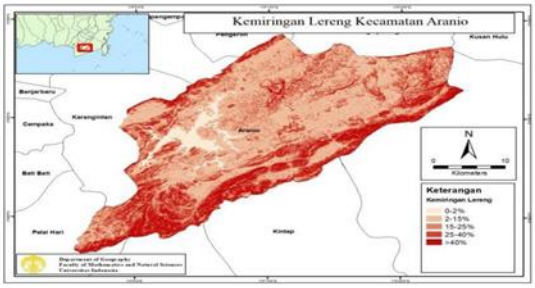

Gambar 2 sumber BAPPELITBANG

Dikutip dari laman BAPPELITBANG (2015) Kecamatan Aranio terdiri dari 12 Desa yaitu Desa Aranio, Tiwingan Lama, Tiwingan Baru, Bunglai, Artain, Paau, Belangian, Benua Riam, Kalaan, Apuai, Rantau Balai, dan Rantau Bujur. Kemiringan lereng yang ada di Kecamatan Aranio terbilang cukup bervariasi mulai dari 2 – 15%, 15 – 40%, hingga >40% seperti disajikan pada gambar. Terdapat kemiringan >40% karena di Kecamatan Aranio yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut terdapat Gunung.

Pada penelitian ini profil subjek penelitian sebagai berikut:

Kopi Aranio

Kopi Aranio merupakah usaha baru yang ada di kecamatan Aranio tiwingan kabupaten banjar, berawal dari hutan kopi liar warisan dari penjajahan belanda yang tidak di budidayakan sama sekali. Kopi Aranio, kopi Aranio sebagai kopi warisan belanda jaman dahulu yang mana dalam prosesnya berkembang yang awalnya adalah hutan kopi yang terbengkalai, tidak di urus masyarakat sekitar sampai akhirnya di budidayakan oleh bapak Asmari dan rekannya Arianto yang melihat potensi dari kopi yang dapat di budidayakan sehingga terbentuklah hutan kopi, dengan modal seadanya dan senekatnya Bapak asmari, Bapak Arianto beserta istrinya yang belum tau cara pengelolaan kopi yang benar mengikuti pameran budaya yang mana disanalah penguasaha UMKM Kopi Aranio memperkenalkan kopi Aranio, kopi warisan dari jaman belanda. Lalu dari sinilah muncul daya Tarik dimana jaman sekarang banyak sekali pecinta kopi yang mana bukan hanya kalangan orang tua, tapi juga semua kalangan menjadi penikmat kopi, baik yang muda, remaja, maupun lansia pangsa pasar kopi pada jaman sekarang mulai menjanjikan omsetnya yang mana pangsa pasarnya sangat mudah dicapai, dengan adanya coffe shoop, cafe kekinian dan minimarket tidak hanya itu kopi robusta yang di budidayakan khas dari Aranio ini sekarang jauh memiliki cita rasa khasnya yang tidak kalah dengan kopi lainnya yang ada di pasaran, berbagai pameran dan festival di ikuti oleh bapak asmari untuk mengenalkan UMKM kopi Aranio yang aktif di selenggarakan baik dari pemerintah daerah, dari Dinas pertanian, dinas pertanian juga ikut serta mengulurkan jaringan untuk pemberdayaan kopi Aranio juga untuk UMKM kopi Aranio warisan belanda ini agar bisa menjangkau pasara yang lebih luas lagi.

Budidaya Kopi Aranio Tiwingan Baru merupakan salah satu desa yang ada di kawasan waduk Riam Kanan di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk menuju desa wisata yang dikenal dengan obyek wisata alam perbukitan Bukit Batas ini harus menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar satu jam dari dermaga Tiwingan Lama. Penyuluh Kehutanan Desa Tiwingan Baru mengatakan desa ini menjadi salah satu sentra produksi kopi tradisional yang ada di Kalsel. Ada beberapa desa di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar yang memang dikenal sebagai daerah penghasil kopi khas Kalsel yang disebut Kopi Aranio, Dari usaha kopi Aranio ini setidaknya dalam satu bulan pemasarannya terjual setengah sampai satu ton karena banyaknya peminat kopi, yang tak lekang waktu baik tua maupun muda. Hal ini dikemuakakan oleh pemilik UMKM Kopi Aranio yaitu Bapak Aianto dan Bapak Asmari.

Melihat besarnya potensi kopi ini, melalui program perhutanan sosial dan Kebun Bibit Desa (KBD) Dinas pertanian Kalsel membantu budidaya tanaman kopi guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Di desa tiwingan baru ada 40 ribu batang bibit tanaman kopi yang nantinya akan ditanam untuk peremajaan tanaman kopi di wilayah tersebut. Selain desa tiwingan baru, dinas pertanian kalsel juga membangun sejumlah kbd khusus tanaman kopi di beberapa daerah lain seperti di desa tiwingan baru, desa balai dan desa rantau bujur. Petani kopi pada kabupaten banjar, kal-sel, mulai mengambangkan kopi di desa tiwingan kabupaten banjar antara lain dengan meningkatkan produksi dan penambahan luas lahan perkebunan.

Diketahui oleh Bapak Arianto selaku pengelola kopi Aranio, beliau sekaligus ketua kelompok tani hutan (KTH), juga sekaligus ketua badan usaha milik desa (Bumdes) potensi untuk perkebunan kopi daerah Aranio potensi untuk perkebunan kopi wilayah kecamatan Aranio memiliki potensi yang cukup besar mengingat kopi sekarang menjadi konsumsi di berbagai kalangan.

Pada saat ini, pohon kopi untuk jenis robusta yang tumbuh pada dataran rendah baik yang tumbuh dengan tidak beratutan sekitar seluar 100 hektare pada daerahnya kopi Aranio ini diperkirakan tumbuh sejak jaman belanda atai disebut juga kopi warisan Belanda sampai saat ini masih tumbuh subur dan berbuah dengan lebat pada saat musim kopi, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk konsumsi sendiri ataupun menjadi mata pencaharian. Kopi Aranio sendiri memiliki ciri khasnya dengan fisik, bijinya kecil dan setelah di roasting menghasilkan bau yang harum, inilah yang membuat para pedagang kopi banyak mencari kopi ini. Permintaan kopi pada saat ini cukup besar mengingat banyaknya peminat kopi dan banyaknya kopi shop daerah yang ingin mengenalkan kopi khas Aranio, ini sayangnya, potensi besar tersebut, dan permintaan yang banyak tersebut belum bisa belum bisa terealisasi padahal permintaan baik dalam daerah, maupun luar daerah, bahkan ada permintaan dari luar negri beberapanya permintaan hampir mencapai 20 ton, untuk saat ini belum bisa UMKM kopi Aranio.

Kopi Aranio dihargai Rp50.000 ribu per kilogram untuk kualitas terbaik dan Rp.35.000 ribu per kilogram untuk kisaran kualitas biasa. Melihat tingginya potensi kopi di Kecamatan Aranio ini, pemerintah juga ikut serta dan berperan dalam budidayanya melalui dinas kooperasi dan perdagangan dan Dinas pertanian Kabupaten Banjar, melakukan pembinaan dan penataan terhadap hutan kopi tersebut. Selain melakukan penataan, pemerintah juga akan membuka lahan baru melalui program kebun bibit desa (KBD) dengan luas lahan sekitar 40 hektar beserta bibit pohon kopi sebanyak 40 ribu pohon.

Program tersebut, merupakan salah satu program meningkatkan jumlah produksi kopi dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga mulai fokus mengembangkan UMKM kopi melalui pelatihan terhadap barista.

Melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menangah (UKM), Pemprov Kalsel mengembangkan usaha pengolahan kopi sebagai potensi usaha baru di provinsi ini.

Pembahasan

Adanya peran dalam hal regulasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menjadi bagian yang sangat penting untuk memperkuat perkembangan UMKM yang sudah ada, dengan kata lain kebijakan Pemerintah memang sangatlah penting dalam upaya pengembangan UMKM khususnya industri kopi Aranio di kecamatan Aranio.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 16 dan diperjelas dalam pasal 17, 18, 19 dan 20. Aturan atau regulasi tesebut menjelaskan tentang peran dari Pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil,

meningkatkan Produksi dan pengolahan, meningkatkan pemasaran, meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan desain dan teknologi yang terdapat di dalam UMKM kopi Aranio. Dari hal tersebut peran pemerintah daerah antara lain berupa:

A. Produksi dan Pengolahan (Fasilitator dan Regulator)

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian Kabupaten Banjar dan dinas pertanian berperan dalam meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada poin pertama, pemerintah daerah Tiwingan baru memberikan pelatihan dalam meningkatkan produksi UMKM Kopi Aranio. Mengarah pada program kerja pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini sesuai hasil wawancara yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas pertanian, juga dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian kabupaten Banjar telah melaksanakan program kerja tahunan yaitu pelatihan gun meningkatkan kualitas dari UMKM. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Arianto selaku pengusaha kopi Aranio.

a. Aspek Teknis Usaha

Pengolahan Kopi Bubuk

"Kopi Aranio" Panen dan Pengeringan Biji kopi dipetik di lahan/kebun pateni sampel sendiri dalam bentuk biji kopi yang sudah siap panen (berwarna merah), kemudian kopi tersebut dijemur di bawah sinar matahari, kemudian dipisahkan antara kulit kopi dengan biji kopi, kemudian biji kopi dikeringkan kembali di sinar matahari, lama pengeringan tergantung cuaca.

b. Penyangraian

Menurut Mulato (2002), roasting/penyangraian adalah bagian penting dari proses pembuatan bubuk kopi. Ini adalah proses perlakuan panas biji kopi untuk membentuk aroma dan rasa kopi yang unik. Biji kopi mengandung sejumlah besar senyawa organik yang merupakan calon untuk menciptakan rasa dan aroma kopi yang unik. Waktu sangrai ditentukan oleh warna biji kopi sangrai. Juga disebut derajat sangrai. Semakin lama waktu sangrai, semakin gelap warna biji kopi sangrai. Penghalusan Biji Kopi Sangrai Menurut Mulato (2002), biji kopi panggang digiling dalam penggiling menjadi butiran kopi bubuk dengan ukuran tertentu. Biji kopi bubuk memiliki luas permukaan yang relatif besar dibandingkan dengan keadaan utuhnya. Oleh karena itu, rasa dan senyawa yang menyegarkan mudah larut dalam air seduhan.

c. Pemasaran

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait UMKM yaitu ditangani Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Banjar dalam pemberdayaan UMKM sentra industri Kopi Aranio di Kabupaten Banjar adalah dengan cara mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran hasil produksi. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk melakukan pengenalan produk UMKM kepada masyarakat luar Kabupaten Banjar, salah satunya bekerjasama dengan warung-warung setempat dalam pemasaran yang ada di daerah kabupaten banjar dan juga disiarkan pada youtube lokal, terkait pemasaran online, langkah ini dilakukan agar para pelaku usaha industri UMKM Kopi Aranio dapat mempromosikan hasil produksi dari luar daerah yang belum terjangkau. Namun, usaha ini dinilai kurang maksimal karena penayangan hanya bersifat berita saja. Para pelaku UMKM berharap ada program khusus untuk promosi hasil produksi khususnya UMKM Kopi Aranio.

Dinas kooperasi dan dinas perdagangan juga dinas pertanian kabupaten Banjar mengadakan pelatihan juga mengadakan pameran produk UMKM yang ada di Banjar setiap

tahunnya. Bantuan pemasaran tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dari dinas koperasi Daerah Kabupaten Banjar, tetapi juga dibantu oleh pihak pemerintahan lain seperti dinas pertanian dan juga dari dinas kehutanan Kabupaten Banjar dan pihak lainnya untuk mengembangkan dengan memperluas jangkauan pemasaran, sehingga tidak hanya di lingkup Kabupaten Banjar. Dengan adanya kerjasama tersebut akan berpengaruh terhadap pengembangan pasar, karena malalui itu dengan adanya pameran lokal, regional maupun nasional yang mampu menarik para konsumen untuk melakukan pemasaran produksi Kopi Aranio Kabupaten Banjar. Namun, tidak hanya pameran saja, para pelaku usaha juga melakukan studi banding untuk mengenalkan produk-produk ke para pengusaha lainnya dan membandingkan bahan-bahan yang baik agar dapat menarik para konsumen dan dapat bersaing pada akses pasar saat ini. Seperti pameran tetapi penjualan hasil produksi belum maksimal dan belum memanfaatkan pasar secara efesien. hasil tersebut diperkuat dengan data bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar sejak diadakannya Rapat Kerja Nasional pada tahun 2020. Melalui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Daerah Kabupaten Banjar membawa dan mempromosikan Kopi Aranio khas Kabupaten Banjar pada masyarakat.

d. Produksi Kopi bubuk

dengan cita rasa yang khas tercipta setelah melalui proses tersebut. Jika cara pengolahan kopinya sempurna maka rasanya akan nikmat, tetapi sebaliknya jika cara pengolahannya tidak baik maka akan mempengaruhi rasa dari kopi tersebut. Kopi bubuk dapat diminum oleh pria dan wanita dari segala usia. Lebih baik minum kopi di pagi hari. Kopi memiliki begitu banyak manfaat, terutama untuk kesehatan, tetapi jangan berlebihan. Kopi bubuk bisa disimpan dalam wadah plastik, toples, atau apapun yang menambah citarasa kopi bubuk. Kegiatan usaha pengolahan bubuk kopi di Desa Aranio dilakukan setiap hari sesuai permintaan konsumen. Produksi kopi bubuk per bulan rata-rata 60 kg atau 2 kg perhari pengrajin. Bungkus plastik bening dan karet gelang digunakan untuk mengemas kopi bubuk di Desa Aranio untuk dijual di pasar tradisional dan toko-toko di sekitarnya Beberapa orang datang langsung ke pengrajin untuk dijual kembali, meskipun sudah ada program BUMDES yang telah mengemas kopi bubuk menjadi lebih baik dengan merek dan kemasan plastik kedap udara.

e. Pendistribusian

1. Distribusi hasil produksi merupakan proses yang sangat ditunggu karena menyangkut pemasaran produk. Pada dasarnya, semakin lancar distribusinya, semakin lancar bisnisnya. Dalam rangkaian kegiatan pemasaran dan distribusi, pengrajin mengiklankan produknya dengan menawarkan kepada tetangganya. Dan juga dapat mengirimkan produknya ke kios atau warung. Jika mereka menghasilkan produk yang banyak, mereka dapat menjual di pasar tradisional sekitarnya
2. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan total untuk pengolahan kopi bubuk adalah sebesar Rp. 17.100.000,- sedangkan biaya total Rp. 12.196.986,5. Maka dapat diketahui besarnya keuntungan yang diterima oleh petani kopi bubuk adalah sebesar 4.903.013,5/bulan.

f. Aspek Ekonomis Usaha

Pengolahan Kopi Bubuk “Kopi Aranio” Dalam kegiatan produksi biasanya diperhitungkan selama produksi dalam satu bulan, meliputi fixed cost (biaya tetap) dan variabel cost (biaya tidak tetap). Biaya tetap meliputi biaya penyusutan alat, pajak dan bunga modal, sedangkan biaya tidak tetap meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, alat dan perlengkapan serta biaya tenaga kerja.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan usaha pengolahan kopi bubuk di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, diperoleh hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Usaha pembuatan kopi bubuk ”Kopi Aranio” di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sudah baik secara teknis, namun tidak terlepas dari kendala alam seperti banjir, hujan dan sebagainya yang menyebabkan terhambatnya pemasaran kopi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai peran pemerintah instansi terkait daerah kabupaten banjar, baik dari dinas kooperasi umkm dan perdagangan juga dinas pertanian dalam pengembangan UMKM pada kopi Aranio. Pemerintah daerah baik dari isntansi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan juga dinas pertanian telah berupaya dalam meningkatkan kemampuan produksi dan pengolahan kopi dengan cara memberikan pelatihan berjangka setiap kalinya dalam kurun waktu tahunan. Pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi dalam menyediakan mesin produksi kopi sehingga bisa menjadikannya kualitas yang lebih baik juga bisa di cari dengan mudah untuk di pulau kalimantan juga dapat mengekspor keluar kalimantan masih. Pemerintah daerah tidak membuat standarisasi dalam produk kopi Aranio agar bisa bersaing di ketatnya perdagangan di luaran, hanya mengikuti standar UMK.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peranannya terhadap UMKM kopi Aranio di Kabupaten Banjar, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah sebagai Fasilitator oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan juga dinas pertanian telah berlansung dengan cukup baik namun tidak bisa dipungkiri jika masih dibutuhkan pelatihan selanjutnya terhadap pengembangan UMKM serta usaha lebih dalam peningkatannya.
2. Peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini pembuatan dan penerapan kebijakan atau aturan yang terkait dengan kegiatan UMKM kopi Aranio oleh pemerintah dianggap sudah ada dan telah dijalankan, namun perlu disadari bahwa masalah regulasi terkait UMKM perlu untuk terus di perhatikan agar tetap menyesuaikan dengan seiring berkembangnya zaman.
3. Peran pemerintah sebagai Katalisator oleh Dinas Koperasi UMKM juga dinas pertanian kabupaten banjar terhadap UMKM kopi Aranio.
4. Peranan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam sekyor perdagangan dan pertanian telah berjalan dengan cukup baik dengan melihat berbagai upaya pemerintah dalam melakukan peningkatan UMKM yang ada baik itu dalam segi SDM ataupun dalam segi kualitas UMKM itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilaku manusia / E. Kristi Poerwandari,Depok : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007

Sandu, Siyoto dan Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. hlm. 27

Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro. Metode Penelitian Kualitatif, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019. hlm. 9

Adler, Patricia A., & Adler, Peter, Membership Roles in Field Research, Newbury Park, CA: Sage Publication, 1987

John, W. Creswell. Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. hlm. 138

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2005, Hlm. 12

Adlan, M. A. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM MENYELAMATKAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI ERA PANDEMI COVID-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 8(1), 81–104. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3552

Ahmad Raihan Nuari. (2017). Pentingnya Usaha Kecil Menengah (Ukm) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Seminar Nasional Multi disiplin Ilmu, 12, 3.

Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(1), 64–72. https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719

Anam, K. (2019). Government Strategy In The Development Of Msme In Jepara District. Journal of Political and Government Studies, 8(3), 211–220.

Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, N. M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. Journal of Government and Politics, 3(1), 47–65.

Bank Indonesia. (2015). Tinjauan Kebijakan Moneter September 2015.

Budi, D., Mushollaeni, W., Yusianto, Y., & Rahmawati, A. (2020). KARAKTERISASI KOPI BUBUK ROBUSTA (Coffea canephora) TULUNGREJO TERFERMENTASI DENGAN RAGI Saccharomyces cerevisiae. Jurnal Agroindustri, 10(2), 129–138. https://doi.org/10.31186/j.agroindustri.10.2.129-138

Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi, 4(1), 80–93. https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77

Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi Modern Dan Umkm Berdasarkan Pp No. 7 Tahun 2021. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 1(01), 21–29. https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1490

Christofer, O. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–10.

Elli, H. S., Pardian, P., Syamsiyah, N. U. R., Pertanian, F., & Padjadjaran, U. (2020). (UMKM) SUKA SANGRAI COFFEE IN SUKA ASIH VILLAGE BANDUNG CITY Produksi Kopi di Indonesia. Agroinfo Galuh, 8(3), 713–723.

Falahudin, I., Raharjeng, A. R. puji, & Harmeni, L. (2016). PENGARUH PUPUK ORGANIK LIMBAH KULIT KOPI (Coffea Arabica L.) TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KOPI. Bioilmi: Jurnal Pendidikan, 2(2), 108–120. https://doi.org/10.19109/bioilmi.v2i2.1135

Hadi, D. P. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di Pnpm-Mp Kabupaten Kendal). Jurnal Ilmiah CIVIS, 5(1), 725–736. http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/633

Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 157–172.

Hartanti, L., & Setiawati, L. (2017). Peran Kebijakan Eksport Pemerintah Terhadap Proses Internasionalisasi Umkm. Business Management Journal, 10(2), 83–92. https://doi.org/10.30813/bmj.v10i2.634

Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. Indonesian Journal of Strategic Management, 4(1). https://doi.org/10.25134/ijsm.v4i1.3952

Herdyansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In Jakarta: Salemba Humanika. http://www.penerbitsalemba.com

Ilmiah, J. (2014). Peran pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah industri marmer guna meningkatkan pendapatan daerah kabupaten tulungagung.

Kabupaten, D. I., & Utara, L. (2020). 334550-Peran-Pemerintah-Daerah-Sebagai-Regulato-48B53768 (1). 3(1), 32–40. https://media.neliti.com/media/publications/334550-peran-pemerintah-daerah-sebagai-regulato-48b53768.pdf

Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting. Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah, 2(1), 107–131. https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.550

Kementerian Keuangan RI, (2021).
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Peran penting yang signifikan oleh UMKM bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia di dukung oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah
Kuddus, M. (2019). Badan pusat statistik Indonesia,2014
Kuncoro, S., Sutiarso, L., Karyadi, J. N. W., & Masithoh, R. E. (2018). Kinetika Reaksi Penurunan Kafein dan Asam Klorogenat Biji Kopi Robusta melalui Pengukusan Sistem Tertutup. Agritech, 38(1), 105. https://doi.org/10.22146/agritech.26469
Laksono, F. D., & Nasikh, N. (2022). Strategi peningkatan umkm kopi yang efektif di kota batu pada masa pandemi covid-19. Kinerja, 19(2), 455–466. https://doi.org/10.30872/jkin.v19i2.10951
Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang. Sebatik, 27(1), 333–343. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2160
Menteri. (2005). Pusat Informasi Bisnis Sentra KUKM. 1–24.
Mulato, Widyotomo, dan Suharyanto. 2006. Teknologi Proses dan Pengolahan Produk Primer dan Sekunder Kopi. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember.
Nabila, M. E., Natalia, D., & Fitriyani, N. T. (2020). Strategi UMKM Berjuang di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada UMKM Rentjana Coffee Roastery). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 19, 264–269.
Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha MIkro, Kecil dan Menengah. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 4(1), 662–669. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278
Niode, I. Y. (2019). Sektor umkm di Indonesia: profil, masalah dan strategi pemberdayaan. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS, 2(1), 1–10. https://repository.ung.ac.id/kategori/show/uncategorized/9446/jurnal-sektor-umkm-di-indonesia-profil-masalah-dan-strategi-pemberdayaan.html
Nirmala, A., Syarief, L., Nikmatullah, D., & Hasanuddin, T. (2022). Pemberdayaan Pelaku usaha Pusat layanan usaha terPadu usaha mikro kecil dan menengah (Plut umkm) di Provinsi lamPung. Ethos: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 10(2), 152–161.
Nirwana, D. C., Muhammadiah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 01. https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890
Nugroho, R., & Febrianto, G. N. (2021). Pendampingan manajemen usaha dan peningkatan kualitas produk umkm kopi adat segunung carangwulung jombang 1,2. 1(3), 236–248.
Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, istimewa A. (2019). Faktor penentu perkembangan umkm gerabah kasongan bantul yogyakarta Determinants of the development of the kasongan bantul earthenware vessel. 15(1), 65–71.
PERBUP NO 30 TAHUN 2023.pdf. (n.d.).
Permana, S. H. (2017a). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. Aspirasi, 8(1), 93–103. http://news.detik.com/
Permana, S. H. (2017b). STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia Sony Hendra Permana. Aspirasi, 8(1), 93–103.
Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Fisip, 1–12.
Pringsewu, K. (n.d.). 1 , 2 , 3 , 4. 13–24.
Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(April), 1–10.
Rahmah, I., Kaukab, M. E., Yuwono, W., Pascasarjana, F., Yogyakarta, U. M., & Artikel, R. (2020).

Kata Kunci: 2, 30–50.
Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan, 2(2), 115–122.
Rizal, H. A., Rifai, M., & Gumilar, G. (2022). Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan umkm. Kinerja, 18(4), 547–553. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10154
Salahudin, S., Wahyudi, W., Ulum, I., & Kurniawan, Y. (2018). Model Manajemen kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Tepung Tapioka. Aristo, 6(1), 18. https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.777
Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 137–143. https://jkp.ejournal.unri.ac.id
Salman Al Farisi. (2022). Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 9(1), 73–84.
Salsabila Rizqita Desmar, I. R. S. (2022). JMBK_SALSABILA_IGNATIUS_ UMKM sebagai sektor perekonomian yang telah banyak memberikan368-378.pdf.
Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(2), 1–189. https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952
Sari, D. I. (2016). Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Hambatan Dan Tantangan Perkembangan Umkm (Studi Kasus Pada Pengrajin Batik Bekasi). Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer EKM-7, SNIPTEK 2016 ISBN: 978-602-72850-3-3.
Sitanggang, J. T. N., & Sembiring, S. A. (2013). Development of the Potential of Coffee as a Leading Commodity in the Agropolitan Region of Dairi Regency. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1(6), 33–48.
Sitepu, S. N. B. (2017). Analisis Peran Pemerintah Terhadap Keberhasilan UMKM Kota Surabaya. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 5(1), 103–116. https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i1.143
Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 5(1), 84–90. https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282
Suyadi, & Syahdanur. (2018). Analisis pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Bengkalis Riau. Jurnal Ekonomi KIAT, 29(1), 1–10.
Tri, D. D., & Darwanto. (2013). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang. Ilmu Ekonomi, 2, 1–40.
Tumija, T. (2022). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2(1), 25–37. https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2328
Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(1), 103–115. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/71
Yose, R. F. (2023). Job Creation Efforts through Empowering Micro, Small and Medium Enterprises. AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 2(2), 1211–1214. https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.719
Yufra TANEO, S. M., Noya, S., Melany, M., & Astridya SETIYATI, E. (2022). The Role of Local Government in Improving Resilience and Performance of Small and Medium-Sized Enterprises in Indonesia*. Journal of Asian Finance, Economic and Business, 9(3), 245–0256. https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no3.0245